

RENCANA

**S
T
R
A
T
E
G
I
S**

RENSTRA

**DINAS
PERHUBUNGAN**

TAHUN 2016 - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



Perubahan Tahun 2019

 (0742) 7351069  dishub.ktl@gmail.com  www.dishub.tanjabbarkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2016-2021 dan memberikan penajaman dalam pelaksanaan Renstra khususnya tahun 2016 dan 2021. Hal dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun kondisi internal.

Sebagai dokumen perencanaan bidang transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2016 dan 2021.

Demikian dokumen Renstra ini kami sampaikan semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak

Kuala Tungkal, Juli 2019

**Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



Des. H. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2 URAIAN TUGAS	8
2.3 SUMBER DAYA SKPD	17
2.4 KINERJA PELAYANAN	19
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD	20
BAB III. STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)	22
3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	23
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN	



HIDUP STRATEGIS	24
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 TUJUAN DAN SASARAN	26
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	36
6.2 INDIKATOR KINERJA	36
6.3 KELOMPOK SASARAN	37
6.4 PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
7.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
7.2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
BAB VII. PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	17
TABEL 2.2 ASSET PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	18
TABEL 3.1 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH	24
TABEL 4.1 VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	27
TABEL 4.2 MATRIKS RELEVANSI RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP VISI & MISI RPJMD	32
TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	38
TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang



berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program Pemerintah Daerah selama lima 5 (lima) tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah RTRW.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- i. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

- 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan



kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan :

1. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Kepala Daerah untuk mewujudkan target yang diinginkan priode 5 (lima) tahun mendatang.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2016 – 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.



BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Fungsi :

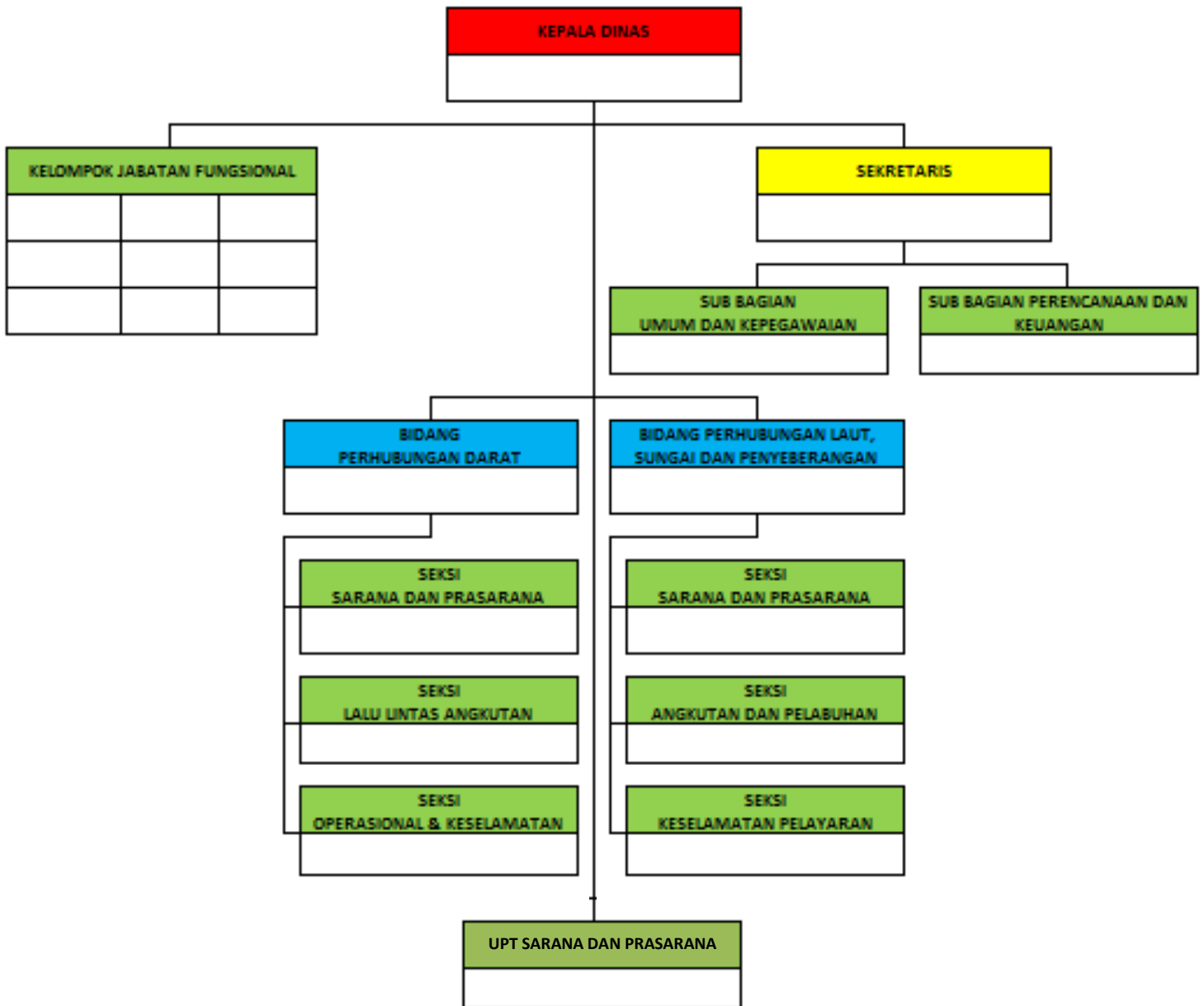
- a. Merumuskan Kebijakan di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan darat dan perhubungan sungai danau dan penyeberangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan darat dan perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perhubungan Darat; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
 - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Operasi dan Keselamatan
4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - Seksi Angkutan dan Kepelabuhan
 - Seksi Keselamatan Pelayaran



**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2.2. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masingmasing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:



1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan;



- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :



- a. Penyusunan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan darat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkretaapian.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan transporatasi darat serta perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD lingkup perhubungan darat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) **Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat**

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan teknis, menyusun rekomendasi, persyaratan, penetapan lokasi, pengadaan, pemeliharaan, pemasangan perlengkapan jalan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanteknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. melakukan penyiapan penetapan lokasi terminal dan persyaratan pengesahan pengoperasian terminal penumpang tipe c, bahan persyaratan pengesahan pembangunan terminal angkutan barang, serta proses pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- d. melakukan penyusunan bahan rekomendasi penetapankelas jalan dan jaringan jalan kabupaten;



- e. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- f. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten, dan rekomendasi persyaratan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan perbengkelan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

6) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kawasan, rencana induk jaringan LLAJ, jaringan trayek, jaringan lintas, pemberian rekomendasi, fasilitasi penyediaan angkutan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam kabupaten, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, dan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan/pedesaan;
- d. melakukan fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- e. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan/pedesaan, rekomendasi izin trayek angkutan umum, AKDP dan AKAP, dan rekomendasi izin penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan rencana induk perkeretaapian dalam wilayah Daerah, rekomendasi penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya



- terletak di dalam wilayah Daerah dan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah serta rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah Daerah;
- g. melakukan penyiapan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

7) Seksi Operasi dan Keselamatan

Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencegahan, pengujian, rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup operasi dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan angkutan khusus serta izin trayek angkutan kota/pedesaan;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan data analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), bahan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala (keur) kendaraan bermotor dan penertiban serta penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
- e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Daerah;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta pemanduan rute untuk pejabat dan/atau tamu daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

8) BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan



prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pelabuhan sungai dan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- c. penetapan standar batas maksimum sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar);
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT lingkup perhubungan laut, sungai dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pemeriksaan, pelaporan, koordinasi, pemeliharaan, pengawasan, pemberian rekomendasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan laut sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan nya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengukuran, pemeriksaan terhadap konstruksi dan permesinan kapal;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan izin lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, baha pertimbangan teknis penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan sungai dan menyiapkan rancang bangun fasilitas pelabuhan sungai lokal;



- d. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) perusahaan angkutan laut dan sungai dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner);
- e. melakukan koordinasi, pemeliharaan dan pengawasan untuk penetapan pemasangan rambu-rambu;
- f. melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, dan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan memberikan rekomendasi teknis kegiatan salvage, dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
- h. melakukan pemetaan alur sungai kebutuhan transportasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

10) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan

Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai tugas merekomendasikan izin usaha, izin trayek, izin pembangunan dan pengoperasian, izin pengembangan dan pengerukan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan dan kepelabuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat orang perorangan atau badan usaha;
- c. merekomendasikan izin usaha penyelenggaraa angkutan sungai dan penyeberangan orang perseorangan atau badan usaha;
- d. merekomendasikan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan serta izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- e. merekomendasikan/izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan penyeberangan, merekomendasikan izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpul lokal;
- f. merekomendasikan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- g. merekomendasikan izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. merekomendasikan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;



- i. merekomendasikan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melakukan pelayanan rekomendasi/pemberian izin usaha pelayaran rakyat (Pelra), bongkar muat angkutan barang khusus dan barang berbahaya, ekspedisi, angkutan sungai;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

11) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi lintas penyeberangan, pengoperasian kapal, pengamanan, penertiban, penegakan hukum, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api;
- c. melakukan pengamanan, penertiban, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sungai;
- d. melakukan pelayanan surat persetujuan berlayar dan pas perairan daratan kapal, melakukan pemeriksaan perlengkapan navigasi kapal dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
- e. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan dokumen pengawakan kapal di bawah GT 7 (<GT7);
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.



2.3. SUMBER DAYA SKPD

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset.

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

**SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :			
	- Eselon II	1	1	-
	- Eselon III	3	3	-
	- Eselon IV	11	10	1
	-Non Eselon	16	13	3
	Jumlah	31	7	4
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	- SD	1	1	0
	- SMP	12	11	1
	- SMA	1	1	0
	- D II	2	1	1
	- D III	0	0	0
	- D IV	12	10	2
	- S.1	2	2	0
	- S.2	31	27	4
	Jumlah			
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status :			
	- PNS	31	27	4
	- Kontrak	90	81	9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur :			



- Diklat PIM II	0	0	0
- Diklat PIM III	1	1	0
- Diklat PIM IV	3	3	0

2.3.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.

Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	1 unit	
	e. Gedung UPTD Pelabuhan Sungai Ka. Tungkal	1 unit	
	f. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	g. Pelabuhan Penyeberangan RORO Ka. Tungkal	1 unit	
	h. Pos pengawasan di dermaga		
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	1 unit	
	i. Halte sungai	15 unit	
	Sarana		
2.	a. Kendaraan operasional kepala dinas	1 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	2 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	3 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	21 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)	2 unit	



3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	
	h. Traffic light	2 unit	
	i. Guadrail	1 paket	
	j. Median	1 paket	
	k. Rambu sungai	30 unit	

2.4 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi maka infrastruktur sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Adapun prasarana yang ada di Dinas Perhubungan antara lain :

Prasarana pendukung operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

Bidang Perhubungan Darat

- a. UPTD Terminal Pembengis
- b. Terminal Kota
- c. Gedung UPTD Parkir
- d. Hanggar Bongkar Muat
- e. Kantor Pos Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan :

- a. UPTD Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal
- b. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal
- c. Pos Pengawasan di setiap dermaga yaitu :
 - Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal
 - Dermaga Tangga Raja Ulu
 - Dermaga Ampera



- Dermaga Pasar Kuatik

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD

2.5.1 Urusan Perhubungan

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.

d. THREATS (ANCAMAN):



1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tangjung Jabung Barat;
2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tangjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya di jaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang perhubungan.
2. Belum memadainya cakupan infrastruktur transportasi.
3. Belum optimalnya pembinaan angkutan, keselamatan lalu lintas.
4. Belum optimalnya distribusi informasi.
5. Belum optimalnya pengendalian.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung dengan Misi, adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan umum (*publik service*) meliputi debirokratisasi, transparansi pelaksanaan pemerintah dalam rangka *good government* dan *clean government*, peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, irigasi, listrik dan jaringan air bersih, serta peningkatan penanganan permasalahan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat melalui pemerataan dan perluasan kualitas pendidikan formal dan informal. Termasuk pendidikan moral, dai desa, imam masjid, kaum masjid dan lainnya, peningkatan derajat kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat melalui mendorong tumbuhnya industri pengolahan dalam rangka menambah *value added*, peningkatan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal menjadi pelabuhan nusantara, penyediaan kapal nelayan berukuran besar untuk dapat mengurangi zona ekonomi eksklusif, penyediaan bibit, pupuk dan teknologi pertanian serta peningkatan daya beli masyarakat (perekonomian).



4. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama suku dan adat istiadat serta mewujudkan supremasi hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pers lokal LSM.

3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.” Sedangkan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : “Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah.” Sedangkan misi adalah :

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.



3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033 yang sudah ditetapkan akan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana pembangunan proyek diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Belum siapnya infrastruktur pendukung sektor perhubungan dan komunikasi	Banyaknya stakeholder dengan berbagai kepentingan	Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan



Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa lima tahun mendatang. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Eksternal:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya kinerja jaringan jalan;
3. Belum optimalnya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat;
4. Belum optimalnya angkutan umum massal dan angkutan umum;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang
6. Tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi;

Internal:

1. Nilai evaluasi kinerja yang belum memadai;
2. Anggaran dan sarpras yang belum memadai.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel 4.1**



Tabel 4.1
VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembegis	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	(100%)
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1%	1%	1%	1%	1%	1%	(100%)
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhanan	1%	1%	1%	5%	7%	10%	(100%)
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	50 Kasus	40	30	20	10	5	5 Kasus
		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 Kasus	4	3	3	3	2	2 Kasus



Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (100%)	1.350 Unit (100%)
Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara suatu organisasi mencapai tujuan. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja organisasi dalam artian dapat menjadi instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2016 – 2021 dapat diformulasikan melalui relevansi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai berikut :

5.1.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat



mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.

4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

Visi & Misi RPJMD

Visi RPJMD	“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “
Misi RPJMD :	
Misi 1	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas
Misi 2	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup



Misi 3	: meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
Misi 4	: Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 1 RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastrukturu Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas. Dengan sasaran 1.1 yaitu Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan konektivitas.

TABEL 5.1
Matriks Relevansi RENSTRA Dinas Perhubungan Terhadap Visi dan Misi

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan

MISI RPJMD

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Ekonomi Yang Berkualitas

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan konektivitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target						Analisis Capaian Tujuan & Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	strategi	Arah kebijakan	Program		
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	1	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal Pembengis	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
			2	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1%	1%	1%	1%	1%	2				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			3	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor kepelabuhanan	1%	1%	1%	5%	7%	10%				3



		Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat dan Laut.	1	Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	50	40	30	20	10	5	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
			2	Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5	4	3	3	3	2	2			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
														Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	1	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4 %)	1.170 Unit (86,6 %)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6 %)	1.300 Unit (96,2 %)	1.350 Unit (100 %)	1	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor



												menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.		
3	Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	78	80	80	85	A	1	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			2	Nilai AKIP	CC	B	B	BB	BB	A	2	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja



											kelola/administrasi/manaje men pemerintahan			
			3	Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	3	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2016-2021 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana prasarana aparatur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan pengembang sistem pelaporan capaian kinerja;
5. Perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7. Peningkatan pelayanan angkutan
8. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
9. Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

6.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya. Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan administrasi perkantoran;
Indikator Kinerja : Persentase kepuasan aparatur
2. Peningkatan sarana prasarana aparatur;
Indikator Kinerja : Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
Indikator Kinerja : Prosentase sumber daya apartur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM.
4. Peningkatan pengembang sistem pelaporan capaian kinerja;



Indikator Kinerja : Nilai AKIP

5. Perencanaan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi
6. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator Kinerja : Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar
7. Peningkatan pelayanan angkutan
Indikator Kinerja : Jumlah Meningkatnya jaminan pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan
8. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Indikator Kinerja : jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas
9. Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
Indikator Kinerja : Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalans

6.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

6.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program-program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada matrik dibawah ini :

Tabel 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

TABEL 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp (Jt)	
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)					
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17						
		Perhubungan																			
Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		-	632.113.220	-	624.687.636	-	704.464.340	-	864.050.000	-	895.050.000	-	924.400.000		4.644.765.196	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	5.400.000	100%	29.700.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	240.400.000	12 Bulan	209.000.000	12 Bulan	208.000.000	12 Bulan	330.000.000	12 Bulan	335.000.000	12 Bulan	340.000.000	12 Bulan	1.662.400.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Operasional dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	53.000.000	12 Bulan	37.200.000	12 Bulan	46.930.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	58.000.000	12 Bulan	60.000.000	100%	310.130.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	98.620.000	12 Bulan	105.820.000	12 Bulan	118.940.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	130.000.000	100%	698.380.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.893.750	12 Bulan	8.027.476	12 Bulan	12.347.240	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.500.000	100%	66.268.466	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		06	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	14.334.170	12 Bulan	50.545.200	12 Bulan	49.845.900	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.000.000	100%	279.725.270	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		07	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Tersedianya Barang Cetak dan Penggantian	12 Bulan	12 Bulan	51.328.000	12 Bulan	34.600.000	12 Bulan	27.550.000	12 Bulan	33.150.000	12 Bulan	34.150.000	12 Bulan	35.000.000	100%	215.778.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.237.300	12 Bulan	4.610.100	12 Bulan	4.611.200	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	6.000.000	100%	28.958.600	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media Cetak / Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	8.000.000	100%	40.500.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		10	Penyediaan makanan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.500.000	60 Orang	31.600.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Kebutuhan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	149.600.000	12 Bulan	160.184.860	12 Bulan	221.540.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	1.281.324.860	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		515.280.000		656.580.000		610.130.000		1.127.560.000		1.150.260.000		1.211.250.000		5.271.060.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	30 Unit	-	0	-	0	1 unit	30.000.000	1 unit	20.000.000	0	0	0	0	2 unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	13 Unit	6 Unit	36.000.000	8 Unit	68.200.000	10 Unit	0	12 Unit	103.560.000	14 Unit	105.260.000	16 Unit	106.250.000	16 Unit	419.270.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung kantor	4 Unit	-	0	2 Unit	81.200.000	2 Unit	0	2 Unit	64.000.000	3 unit	45.000.000	4 Unit	45.000.000	4 Unit	235.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	32 Unit	30 Unit	384.680.000	30 Unit	396.680.000	30 unit	472.180.000	30 unit	500.000.000	30 unit	550.000.000	32 unit	600.000.000	32 unit	2.903.540.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Terpeliharanya gedung kantor	5 Unit	1 Unit	52.000.000	1 Unit	52.000.000	2 unit	28.400.000	3 unit	360.000.000	4 unit	360.000.000	5 unit	360.000.000	5 unit	1.212.400.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp (Jt)			
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)							
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Terpeliharanya peralatan gedung kantor	54 Unit	28 Unit	42.600.000	36 Unit	58.500.000	36 unit	79.550.000	40 unit	80.000.000	50 unit	90.000.000	54 unit	100.000.000	54 unit	450.650.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		0	51.200.000		40.720.000		89.375.000		130.000.000	-	132.000.000	-	135.000.000		578.295.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		18	Pengadaan pakaian dinas dinas dan perlengkapan	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	130 stel	132 stel	51.200.000	132 stel	40.720.000	132 stel	89.375.000	132 stel	130.000.000	132 stel	132.000.000	132 stel	135.000.000		578.295.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		0	-		0	-		60.000.000		60.000.000	2 Orang	60.000.000		60.000.000		180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		19	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	5 Orang	0	-	0	-	0	-	2 orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		0	112.800.000		108.900.000		117.610.000		120.000.000		125.000.000		80.000.000		664.310.000			DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	100%	112.800.000	100%	108.900.000	100%	117.610.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	80.000.000	100%	664.310.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang			1.483.305.000		133.000.000		128.380.000		280.000.000	2	250.000.000	2	160.000.000		2.434.685.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		21	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	2 Dokumen	2 Dokumen	508.500.000	2 Dokumen	133.000.000	2 dokumen	128.380.000	2 dokumen	180.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	1.259.880.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		22	Peningkatan Pengawasan Pengamanan dan Pengawasan LLAD	Persentase Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan LLAD	100%	100%	632.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		23	Peningkatan Pengawasan Pengamanan dan Pengamanan Informatika dan Komunikasi	Persentase Meningkatnya pengawasan pengamanan informatika dan komunikasi	100%	100%	342.205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		24	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan Prosedur bidang perhubungan	Jumlah Tersedianya dokumen kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang	5 Dokumen	-	0	-	0	0	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	0	-	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (L.A.J)	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar		-	0		70.000.000	35%	58.768.000		400.000.000	55%	450.000.000		500.000.000		1.478.768.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		25	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Prasarana Perhubungan yang menjadi baik dan layak digunakan	13 Unit	-	0	7 unit	70.000.000	8 unit	58.768.000	10 unit	400.000.000	13 unit	450.000.000	13 unit	500.000.000	13 unit	1.478.768.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rp (Jt)	
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)					
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Meningkatnya jaminan pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan		-	1.078.800.000		1.325.810.000		1.646.813.000		1.813.000.000	20	1.941.000.000	22	1.911.000.000		9.716.423.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		26	Peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	2 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		27	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dan Parkir	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	2 Dokumen	2 Dokumen	465.000.000	100%	530.480.000	2 dokumen	777.200.000	2 dokumen	780.000.000	2 dokumen	790.000.000	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	4.142.680.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		28	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	terpilinya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan	2 Orang	-	0	-	0	1 orang	0	2 orang	45.000.000	2 orang	45.000.000	2 orang	50.000.000	2 orang	140.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		29	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Frekuensi pengawasan Pengendalian sungai dan penyeberangan	16 Kali	100%	244.600.000	100%	228.000.000	2 kali	257.560.000	2 kali	298.000.000	2	306.000.000	2 Kali	321.000.000	2 Kali	1.655.160.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		30	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan sungai	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan sungai	12 Kali	-	0	-	0	0	0	-	1	85.000.000	-	85.000.000	-	85.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	31	Forum lalu lintas angkutan jalan	Jumlah rapat-rapat pembahasan forum I I A I	12 Kali	4 Kali	211.200.000	4 kali	212.000.000	4 kali	208.000.000	4 kali	250.000.000	4 kali	250.000.000	4 kali	250.000.000	4 kali	1.381.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		32	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah pengamanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan	6 Kali	8 kali	158.000.000	8 kali	158.000.000	8 kali	151.838.000	8 kali	180.000.000	8 kali	200.000.000	8 kali	220.000.000	8 kali	1.067.838.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		34	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan pelabuhan sungai dan penyeberangan	Jumlah Laporan operasional penumpang dan bongkar muat barang	1 Dokumen	-	0	2 dokumen	197.330.000	2 dokumen	252.215.000	2 dokumen	260.000.000	2 dokumen	265.000.000	2 dokumen	270.000.000	2 dokumen	1.244.545.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		35	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rasio Rambu terpasang (pada Titik rawan kecelakaan)	300 Unit	-	0		0		0		250.000.000		260.000.000		265.000.000		775.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
			- Rambu		-	-	30	-	30												
			- Marka Jalan		-	-	200	-	200												
			- Guardrail		-	-		-	150												
			- RPPJ		-	-		-	3		7		5								
			36	Pengadaan rambu lalu lintas sungai	Rasio Rambu terpasang (pada Titik rawan kecelakaan)	150 Unit	-	-	35	-	35										

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rp (Jt)			
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)							
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		37	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas	30 Kali	-	0	12	664.600.000		708.360.000		760.000.000		770.000.000		780.000.000		3.682.960.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	9	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji	1350 Unit	1154 Unit	228.907.000	2000	198.000.000	2100	8.800.000	2200	110.000.000	2300	120.000.000	2400	140.000.000		805.707.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		38	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	5 Unit	-	0		130.000.000	1	0									130.000.000			
		39	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	100%	100%	228.907.000	2000	68.000.000	2100	8.800.000	2200	110.000.000	2300	120.000.000	2400	140.000.000	2400	140.000.000	2400	675.707.000		
					- cetak buku uji				2000		2100		2200		2300		2400		2400		2400		
				- cetak plat uji/ penneng			0		2100		2200		2300		2400		2400		2400				
				- cetak stiker samping			2000		2100		2200		2300		2400		2400		2400				
			JUMLAH				4.102.405.220		3.822.297.636		4.072.700.340		5.914.610.000		6.153.310.000		6.166.650.000		30.231.973.196				

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENDANG SURYA, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650619 198512 1 001



BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016 – 2021 yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- Tujuan RPJMD : 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar yang Berkualitas.
- Sasaran RPJMD : 2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan konektivitas.
- Strategi RPJMD : 1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis
2. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pengembangan daerah.
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan / Pembangunan jembatan beton di ruas jalan Utama.

7.2. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, tersusun dalam tabel sebagai berikut :Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang



Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (100%)	1.350 Unit (100%)
2	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut	Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	50 Kasus	40	30	20	10	5	5 Kasus
		Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	5 Kasus	4	3	3	3	2	2 Kasus
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan	Persentase Peningkatan Retribusi pada Terminal Pembengis	Rp.	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Rp.
		Persentase Peningkatan Retribusi pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	1%	1%	1%	1%	1%	Rp.
		Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhanan	Rp.	1%	1%	5%	7%	10%	Rp.
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan



BAB VIII PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - Tahun 2021, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2016 - 2021. dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Perhubungan. dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Kuala Tungkal, Juli 2019

Penanggung Jawab

Dinas Perhubungan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650619 198512 1 001

**MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016 - 2021
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp (Jt)	
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)					
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17						
		Perhubungan																			
Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		-	632.113.220	-	624.687.636	-	704.464.340	-	864.050.000	-	895.050.000	-	924.400.000		4.644.765.196	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	4.500.000	12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	5.400.000	100%	29.700.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	240.400.000	12 Bulan	209.000.000	12 Bulan	208.000.000	12 Bulan	330.000.000	12 Bulan	335.000.000	12 Bulan	340.000.000	12 Bulan	1.662.400.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Operasional dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	53.000.000	12 Bulan	37.200.000	12 Bulan	46.930.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	58.000.000	12 Bulan	60.000.000	100%	310.130.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	98.620.000	12 Bulan	105.820.000	12 Bulan	118.940.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	130.000.000	100%	698.380.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.893.750	12 Bulan	8.027.476	12 Bulan	12.347.240	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.500.000	100%	66.268.466	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		06	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	14.334.170	12 Bulan	50.545.200	12 Bulan	49.845.900	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.000.000	100%	279.725.270	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		07	Penyediaan barang cetakan dan pengangadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengangadaan	12 Bulan	12 Bulan	51.328.000	12 Bulan	34.600.000	12 Bulan	27.550.000	12 Bulan	33.150.000	12 Bulan	34.150.000	12 Bulan	35.000.000	100%	215.778.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.237.300	12 Bulan	4.610.100	12 Bulan	4.611.200	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	6.000.000	100%	28.958.600	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media Cetak / Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	8.000.000	100%	40.500.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		10	Penyediaan makanan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.500.000	60 Orang	31.600.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Kebutuhan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	149.600.000	12 Bulan	160.184.860	12 Bulan	221.540.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	1.281.324.860	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		515.280.000		656.580.000		610.130.000		1.127.560.000		1.150.260.000		1.211.250.000		5.271.060.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	30 Unit	-	0	-	0	1 unit	30.000.000	1 unit	20.000.000	0	0	0	0	2 unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	13 Unit	6 Unit	36.000.000	8 Unit	68.200.000	10 Unit	0	12 Unit	103.560.000	14 Unit	105.260.000	16 Unit	106.250.000	16 Unit	419.270.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung kantor	4 Unit	-	0	2 Unit	81.200.000	2 Unit	0	2 Unit	64.000.000	3 unit	45.000.000	4 Unit	45.000.000	4 Unit	235.200.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	32 Unit	30 Unit	384.680.000	30 Unit	396.680.000	30 unit	472.180.000	30 unit	500.000.000	30 unit	550.000.000	32 unit	600.000.000	32 unit	2.903.540.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Terpeliharanya gedung kantor	5 Unit	1 Unit	52.000.000	1 Unit	52.000.000	2 unit	28.400.000	3 unit	360.000.000	4 unit	360.000.000	5 unit	360.000.000	5 unit	1.212.400.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp (Jt)		
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)						
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Terpeliharanya peralatan gedung kantor	54 Unit	28 Unit	42.600.000	36 Unit	58.500.000	36 unit	79.550.000	40 unit	80.000.000	50 unit	90.000.000	54 unit	100.000.000	54 unit	450.650.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, berkualitas dan berakhlak mulia.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		0	51.200.000		40.720.000		89.375.000		130.000.000	-	132.000.000	-	135.000.000		578.295.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		18	Pengadaan pakaian dinas dinas dan perlengkapan	Jumlah pakaian dinas terpenuhi	130 stel	132 stel	51.200.000	132 stel	40.720.000	132 stel	89.375.000	132 stel	130.000.000	132 stel	132.000.000	132 stel	135.000.000		578.295.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		0	-		0	-		60.000.000		60.000.000	2 Orang	60.000.000		60.000.000		180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		19	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	5 Orang	0	-	0	-	0	-	2 orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	60.000.000	2 Orang	180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
																					DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor		0	112.800.000		108.900.000		117.610.000		120.000.000		125.000.000		80.000.000		664.310.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	100%	112.800.000	100%	108.900.000	100%	117.610.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	80.000.000	100%	664.310.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Penyeberangan.	6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang			1.483.305.000		133.000.000		128.380.000		280.000.000	2	250.000.000	2	160.000.000		2.434.685.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		21	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	2 Dokumen	2 Dokumen	508.500.000	2 Dokumen	133.000.000	2 dokumen	128.380.000	2 dokumen	180.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	1.259.880.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		22	Peningkatan Pengawasan Pengamanan dan Pengawasan LLAD	Persentase Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan LLAD	100%	100%	632.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT
		23	Peningkatan Pengawasan Pengamanan dan Pengamanan Informatika dan Komunikasi	Persentase Meningkatnya pengawasan pengamanan informatika dan komunikasi	100%	100%	342.205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		24	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan Prosedur bidang perhubungan	Jumlah Tersedianya dokumen kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang	5 Dokumen	-	0	-	0	0	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	0	-	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (L.A.J)	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar		-	0		70.000.000	35%	58.768.000		400.000.000	55%	450.000.000		500.000.000		1.478.768.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	
		25	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Prasarana Perhubungan yang menjadi baik dan layak digunakan	13 Unit	-	0	7 unit	70.000.000	8 unit	58.768.000	10 unit	400.000.000	13 unit	450.000.000	13 unit	500.000.000	13 unit	1.478.768.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target			Rp (Jt)			
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)							
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		37	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penertiban dan rekayasa lalu lintas	30 Kali	-	0	664.600.000		708.360.000		760.000.000		770.000.000		780.000.000		3.682.960.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT			
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	9	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji	1350 Unit	1154 Unit	228.907.000	2000	198.000.000	2100	8.800.000	2200	110.000.000	2300	120.000.000	2400	140.000.000		805.707.000	DINAS PERHUBUNGAN	KAB. TANJAB BARAT		
		38	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	5 Unit	-	0		130.000.000	1	0									130.000.000			
		39	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	100%	100%	228.907.000	2000	68.000.000	2100	8.800.000	2200	110.000.000	2300	120.000.000	2400	140.000.000	2400	140.000.000	2400	675.707.000		
					- cetak buku uji				2000		2100		2200		2300		2400		2400		2400		
				- cetak plat uji/ penneng				0	2100		2200		2300		2400		2400		2400				
				- cetak stiker samping				2000	2100		2200		2300		2400		2400		2400				
			JUMLAH			4.102.405.220		3.822.297.636		4.072.700.340		5.914.610.000		6.153.310.000		6.166.650.000		30.231.973.196					